

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Sabu Raijua sudah ditetapkan tujuan dan target yang hendak dicapai, akan tetapi pada pelaksanaannya belum dilaksanakan secara optimal sesuai dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak terealisasinya target pelaksanaan pembangunan jalan serta kondisi ruas-ruas jalan yang dibangun mengalami kerusakan berupa jalan berlubang, jalan masih berbatu-batu, bedebuh dan Sebagian besar berupa jalan tanah serta kondisi jalan mengalami rusak ringan dan rusak berat.

Meskipun belum dilaksanakan secara optimal pembangunan infrastruktur jalan sangat membantu dan memudahkan masyarakat Kabupaten Sabu Raijua. Ini merupakan hasil dari pembangunan jalan, yang semula tidak memiliki akses untuk ke ibu Kota Kecamatan/Kabupaten sekarang setelah pemekaran dan pembangunan jalan di wilayah Kabupaten Sabu Raijua masyarakat dapat mengakses fasilitas-fasilitas pendukung yaitu: dukungan dari masyarakat, pelaksanaan, pengawas kontraktor dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan.

Berdasarkan uraian mengenai implmentasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di kabupaten sabu raijua, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kominukasi

- a) Dengan melakukan pendekatan secara individu terhadap masing-masing orang yang memiliki lahan yang terdampak, kemudian komunikasi lain itu bisa melalui surat yang lebih kepada komunikasi-komunikasi yang sifatnya informasi dan lain sebagainya.

- b) Bentuk-bentuk komunikasi yaitu lebih kepada koordinasi, kemudian laporan-laporan evaluasi per kegiatan, kemudian kepada tingkat-tingkat yang lebih di bawah dan juga dikasih lisan dalam bentuk rapat atau arahan-arahan teknis yang bisa kita terima dari pimpinan yang lebih atas yang harus kita sampaikan kepada staf-staf yang kita pimpin

2. Sumber Daya

- a) Untuk sementara di tahun 2021 masih ada pekerjaan berkelanjutan di Kecamatan Raijua khususnya di infrastruktur jalan, kendala-kendala yang dihadapi yaitu susanya bahan bakar solar sehingga pekerjaan yang dikerjakan diundurkan kurang lebih dua bulan dan peningkatan jalan Ledeke-Hallapaji juga mengalami kendala yaitu kelalaian penyedia yang tidak cermat dalam mendatangkan material
- b) Kami sebagai masyarakat berharap bahwa pemerintah dapat memperhatikan kembali pembangunan-pembangunan yang ada terutama pembangunan jalan yang masih minim karena, pembangunan jalan juga merupakan sebuah layanan dari pemerintah

3. Sikap Pelaksana

- a) Memang keterbatasan anggaran memang masih menjadi kendala tersendiri. Namun, pemerintah terus memberikan perhatian dengan berupaya menaikkan status jalan yang masih non status. Tahun 2021 ini ada anggaran sebesar Rp 8 miliar lebih untuk pembangunan jalan di Raijua.
- b) Sabu Raijua akan melakukan percepatan pembangunan di bidang infrastruktur pada tahun 2020 seperti pembangunan objek wisata, pembangunan embung serta jembatan

4. Struktur Birokrasi

- a) Memang keterbatasan anggaran memang masih menjadi kendala tersendiri. Namun, pemerintah terus memberikan perhatian dengan berupaya menaikkan status jalan yang masih non status. Tahun 2021 ini ada anggaran sebesar Rp 8 miliar lebih untuk pembangunan jalan di Rajjua.
- b) Kita terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Dinas PU Propinsi dan Kementerian PUPR di Jakarta, agar kita mendapatkan dukungan anggaran setiap tahun.

6.2 Saran

1. Pemerintah kabupaten sabu rajjua harus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan daerah yang lebih profesional sesuai dengan potensi daerah melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sistem insentif yang memadai.
2. Pemerintah dan kontraktor pelaksanaan pembangunan harus menyiapkan sarana dan prasarana berupa alat-alat berat yang cukup memadai agar dalam proses pelaksanaan pembangunan jalan bisa berjalan sesuai target dan rencana.
3. Untuk memaksimalkan proses pembangunan jalan kabupaten sabu rajjua, maka perlu dilakukan kembali pembangunan jalan, penataan jalan dan melakukan pemeliharaan jalan tersebut secara rutin agar jalan tetap dalam kondisi baik dan handal dalam menunjang akseibilitas, mobilitas barang dan jasa.
4. Diharapkan pemerintah kabupaten sabu rajjua dalam proses pembangunan jalan memperhatikan tahap-tahap dalam mengelola pembangunan daerah agar dapat memenuhi unsur kebijakan publik secara transparan dan berkelanjutan.

Adapun saran yang dilakukan peneliti dalam pengelolaan obyek wisata Panta Sualamnda selama masa Pandemi yaitu:

- Peneliti

Peneliti menemukan saran sendiri untuk penulisan ini yang mana hingga akhir penulisan peneliti masi ditemukan beberapa kekurangan. Dalam proses pengumpulan data peneliti kurang banyak dalam mengali informasi mengenai infrastruktur jalan di Kabupaten Sabu Raijua. Selain itu, penelitian masi memerlukan beberapa perkembangan baru mengenai proyek perkembanagan infrastruktur jalan raya yang masi belum terselesaikan hingga saat ini, sehingga besar harapan kepada peneliti selanjutnya yang ingin peneliti meneliti bisa mengutip dan melengkapi kekurangan-kekurangan dalam penulisan skripsi ini

- Masyarakat

Masyarakat selaku pemilik wilayah, yang pertama perlu memiliki rasa nasionalisme yang besar. Bekerja memeing perlu namun masyarakat perlu sekolah untuk bisa membangun daerah asal agar tidak tertinggal. Rasa nasionalisme atau cita tana air itu peru diterapkan pada anak usia dini agar diusia beranjak dewasa mereka bisa membagun dan mengangkat derajat bangsa di mata dunia akibat dari rendanya SDM Masyarakat di Kabupaten Sabu Raijua hanya bisa menjadi pembantu du tanah sendiri, padahal banyak potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Sabu Rijua.

Dafta Pustaka

Jurnal dan Skripsi:

- Aaneta, Asna. 2010. *Implementasi Kebijakan Program penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kota Gorontalo*. Universitas Negri Gorontalo. Vol 1 No.1
- Akib, Haedar. 2010. *Implementasi Kebijakan , Apa, Mengapa, dan Bagaimana*. Universitas Negri Makassar. Vol. 1 No. 1.
- Kusuma, Cut Nanda. 2015. *Pengaruh Pembagunan Infrastruktur Dasar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. Universitas Syiah Kaula, Banda Aceh. Vol. 4. No. 1
- Khairi, Halilul. 2005. *Konsep Kebijakan Publik*. Modul MIPK 5302
- Lestari, Endah Puji. 2010. *Implemetasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (Studi pada Pavingisasi Jalan Desa di Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro)* Universitas Brawijaya, Malang. Vol. 3 nO. 5
- Magfirullah, Habil Muranda. 2018. *Teori dan Model Implementasi Kebijakan Publik*. Universitas Brawijaya
- Rahman, Muhammad Haristo. 2019. *Analisis Pelaksanaan Manajemen Aset Infrastruktur Gedung Dewi Sartika*. Universitas Negeri Jakarta. Universitas Negeri Jakarta.
- Suryawardana, Edy dan Dian Triyani. 2015. *Analisis Dampak Pembagunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi Rakyat di Kota Semarang*. Jurnal Dinamika Sosbud. Vol.17. No. 2
- Suciati Anisa. 2017. *Kebijakan Publik dan Partisipasi Masyarakat*. Universitas Islam Negeri Hidayatullah Jakarta.
- Sugiharto. 2019. *Analisis Pengaruh Infrastruktur Jalan Dan Listrik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2007-2016 Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Sagala, Zupi Andriyani. 2019. *Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Sumber Daya Alam Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten. Labuhanbatu Utara*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Berita:

Saburairjuakab.go.id. 2014. *Infrastruktur Transportasi*. Diakses pada tanggal 15 Mei 2021

M-kumparan-com-id. 2021. *Profil Sabu Raijua, Wilayah Kepulauan di NTT yang Berbatasan dengan Australia*. Diakses pada tanggal 24 Mei 2021

Wartaekonomi.co.id. 2021 *Pembangunan Infrastruktur Jalan di Sabu Rijua Terus Ditingkatkan*. Diakses pada tanggal 11 Februari 2021

Sumber Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2004 Tentang Jalan

Undang-undang No. 32 tahun 2009, Tentang Lingkungan Hidup

Undang-undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia Tentang Pembangunan Infrastruktur Jalan.